

PERHISTORIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAF AF 1052/per-ump/2010  
MUSKAB 29-9-2010

**PERANAN PRASARANA USAHA KEPARIWISATAAN KOTA  
PALEMBANG TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI  
USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**Nama : JEKI HARYADI  
Nim : 22 2006 078**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2010**



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeki Haryadi

NIM : 222006078

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



Jeki Haryadi

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : PERANAN PRASARANA USAHA  
KEPARIWISATAAN KOTA PALEMBANG  
TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI  
USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA  
PALEMBANG**

**NAMA : JEKI HARYADI**  
**NIM : 22 2006 078**  
**Fakultas : Ekonomi**  
**Jurusan : Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

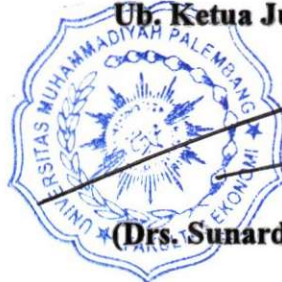
**Diterima dan disyahkan  
Pada tanggal 7 September 2010**

**Pembimbing,**



**(Betri Sirajuddin, SE, Ak, M.Si)**

**Mengetahui,  
Ub. Ketua Jurusan Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, SE, M.Si)**

**MOTTO:**

**JIKA KITA MENANAM YANG BAIK MAKA KITA AKAN  
MENDAPATKAN HASIL YANG BAIK PULA**

**(Jeki Haryadi)**

Terucap Syukur Padamu Allah SWT

Kupersembahkan kepada .

- Ayah dan mamaku tercinta
- Saudara-saudaraku Tersayang
- Pembimbing Skripsi
- Someone special
- Almamater



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Peranan Prasarana Usaha Kepariwisata Kota Palembang Terhadap Penerimaan Retribusi Usaha Kepariwisata di Kota Palembang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Akuntansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, SE, Ak. M.Si, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si dan Ibu Welly, SE. M.Si selaku Ketua, Pembimbing Akademik dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ayah dan Ibundaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat (Ibunda tercinta(Haina), Nurahman, Sofyan, Suyati, Kemas Achmad Soleh Wiraksana ).
6. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Akuntansi khususnya angkatan 2006 (Ika septiana, Dita friska,Febrina eka reza, Malinda, Furi, Angga, Solihin, Lizo, Hendri, Kani, Pance, Sepri, Mirul, Topan, dll)
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal ibadah yang telah dilakukan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 7 September 2010

Penulis



Jeki Haryadi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Penelitian Sebelumnya.....	6
B. Landasan Teori.....	7

**BAB V SIMPULAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Prasarana Kepariwisataaan.....	7
a. Pengertian prasarana kepariwisataan.....	7
b. Jenis-jenis prasarana.....	8
2. Retribusi daerah.....	9
a. Pengertian retribusi daerah.....	9
b. Objek retribusi.....	9
c. Penggolongan retribusi retribusi.....	10
3. Retribusi usaha kepariwisataan.....	12
4. Tarif retribusi usaha kepariwistaan.....	13
5. Mekanisme pemungutan retribusi usaha kepariwisataan.....	18
6. Pemungutan retribusi daerah.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tempat Penelitian.....	21
C. Operasionalisasi Variabel.....	22
D. Data yang Diperlukan.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Analisis dan Teknik Analisis.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian.....	26
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47

## DAFTAR TABEL

Table	Judul	
Halaman		
Tabel I.1	Daftar Realisasi Retribusi Usaha Kepariwisataaan.....	4
Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel.....	22
Tabel IV.1	Pekembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kota Palembang.....	60
Tabel VI.2	Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Sebelum dan Sesudahnya Penambahan Prasarana.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar IV. 1	Skema Proses Pemberiaan Ijin Usaha Kepariwisataaan.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keterangan selesai riset

Lampiran 2 : Kartu aktivitas bimbingan skripsi

Lampiran 3 : Sertifikat membaca Al-Quran

Lampiran 4 : biodata penulis



## **ABSTRAK**

Jeki Haryadi/222006078/2010/Peranan Prasarana Usaha Kepariwisataaan Kota Palembang Terhadap Penerimaan Retribusi Usaha Kepariwisataaan di Kota Palembang/Akuntansi

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan prasarana usaha kepariwisataan Kota Palembang terhadap penerimaan retribusi kepariwisataan di Kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif . Variabel penelitian prasarana kepariwisataan dan penerimaan retribusi daerah. Metode pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan dan prasarana usaha kepariwisataan terhadap penerimaan retribusi usaha kepariwisataan kota Palembang. Dapat diambil kesimpulan bahwa penambahan prasarana usaha kepariwisataan kota palembang terhadap penerimaan retribusi usaha kepariwisataan di kota palembang tidak sesuai dengan target yang diinginkan, karena penerimaan retribusi usaha kepariwisataan setelah penambahan prasarana usaha kepariwisataan semakin menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bosan mengunjungi tempat-tempat wisata meskipun prasarana usaha kepariwisataan terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peningkatan tempat-tempat wisata.

Kata kunci : prasarana kepariwisataan dan penerimaan retribusi daerah

## **ABSTRACT**

*Jeki Haryadi/222006078/2010/the role tourism infrastructure to the receipt of tourism retribution in Palembang*

*The purpose of this study was to know how the role of tourism infrastructure to the receipt of tourism retribution in Palembang this study used descriptive research. The variables of this study were tourism infrastructure and the receipt of tourism retribution the technique of collecting data were interview and documentation the method of analyzing data was qualitative analysis.*

*The result of the study showed that the addition of tourism infrastructure didn't reach the target which was expected. It could be seen from the decreasing of the receipt of tourism retribution after the addition of tourism infrastructure. It happened due to the visitors' freedom in visiting the tourism area even though the tourism infrastructure kept increasing. It was caused by the quality of the tourism area which was unchanged.*

*Keywords : tourism infrastructure and the receipt of tourism retribution*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan di sektor pariwisata dengan cara perbaikan, peningkatan objek-objek wisata yang ada seperti peninggalan-peninggalan sejarah potensi untuk wisata air serta sarana-sarana pariwisata sungai merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Palembang. Peran sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pendapatan daerah melalui kunjungan wisata, tetapi juga membuka peluang yang menyerap tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dunia pariwisata menjadi salah satu andalan setiap daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program pemerintah visit Musi 2009 bertujuan untuk menciptakan Kota Palembang yang lebih maju dan lebih terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, melalui program pemerintah Visit Musi 2009 di harapkan bahwa dunia pariwisata di Kota Palembang menjadi salah satu andalan bagi pemasukan daerah seperti di negara-negara tetangga.

Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penunjang pembangunan daerah yang memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.



PAD terdiri dari 4 komponen, yaitu :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian laba perusahaan daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperbaharui menjadi UU No. 33 tahun 2004, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang ada untuk menyumbang ke kas negara sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Palembang sebagai salah satu dinas dalam jajaran pemerintah Kota Palembang merupakan instansi yang berwenang dalam menangani masalah kepariwisataan Kota Palembang dengan visi mewujudkan pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan (Walikota, Wakil walikota, dan Setda Kota Palembang). Fungsi Dinas Pariwisata Kota Palembang yaitu merupakan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah, pengolahan perizinan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan, pembinaan terhadap unsur pelaksanaan dinas, dan pelaksanaan unsur ketata usahaan dinas.



Program pemerintah Visit Musi 2009 akan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan retribusi daerah terutama retribusi usaha kepariwisataan di Kota Palembang. Retribusi usaha kepariwisataan adalah biaya yang dipungut atas pelayanan sektor pariwisata yang disediakan oleh pemerintah Kota. Berdasarkan UU No.34 tahun 2000, retribusi usaha kepariwisataan merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi usaha kepariwisataan terdiri dari subjek, objek, dan wajib retribusi. Oleh karena itu, seharusnya retribusi usaha kepariwisataan yang akan diterima dari tahun ke tahun dapat meningkat atau memenuhi target yang telah ditetapkan seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan usaha kepariwisataan di Kota Palembang.

Sektor pariwisata di Kota Palembang sangat beragam yaitu terdiri dari kawasan objek wisata, wisata tirta berupa transportasi wisata, hotel, restoran, rumah makan, cafe, jasa boga, perjalanan wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, dan tempat olah raga. Salah satu tempat wisata di Kota Palembang yaitu Benteng Kuto Besak (BKB). Sektor pariwisata di Kota Palembang bukan hanya tempat wisata saja, akan tetapi juga termasuk hotel, rumah makan, cafe, dan sebagainya. Dari berbagai macam sektor pariwisata tersebut, akan dipungut retribusi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan usaha kepariwisataan di Kota Palembang, maka diharapkan bahwa retribusi usaha kepariwisataan juga dapat meningkatkan retribusi daerah. Akan tetapi, pada

kenyataannya retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang mengalami penurunan yang cukup drastis.

**Tabel I.1**  
**Daftar Realisasi Retribusi Usaha Kepariwisata**  
**Kota Palembang tahun 2007 s/d 2009**

No.	Tahun	Realisasi	Penambahan fasilitas	
			BKB	Kambang Iwak
1.	2007	Rp. 433.711.135	Warung kopi terapung	Taman dan Kantin
2.	2008	Rp. 417.017.260	Taman	Jalur jogging/ jalan santai
3.	2009	Rp. 324.216.000	Tourist informasion centre	Kif Park

**Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, 2009.**

Berdasarkan dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun mengalami kemunduran sedangkan fasilitas yang disediakan mengalami penambahan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Prasarana Usaha Kepariwisata Kota Palembang Terhadap Penerimaan Retribusi Usaha Kepariwisata di Kota Palembang.”**

#### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana peranan prasarana usaha kepariwisataan Kota Palembang terhadap penerimaan retribusi usaha kepariwisataan di Kota Palembang.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peranan prasarana usaha kepariwisataan Kota Palembang terhadap penerimaan retribusi usaha kepariwisataan di Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

#### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai retribusi daerah yang salah satunya yaitu retribusi usaha kepariwisataan.

#### 2. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

Sebagai bahan masukan mengenai retribusi usaha kepariwisataan sehingga dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

#### 3. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Sebagai pedoman dalam penelitian, peneliti mengambil kutipan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kepariwisataaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Pismar Hardiyansyah (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Terdapat 1 variabel yang digunakan yaitu mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian yaitu mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum berjalan dengan baik dan dapat dilihat dari, pendapatan objek retribusi jasa usaha kepariwisataan terlalu lama, tarif retribusi masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah, dan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi belum optimal.

## **B. Landasan Teori**

### 1. Prasarana Kepariwisata

#### a. Pengertian Prasarana dan Pariwisata

Prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian (industri wisata) berjalan sedemikian rupa, sehingga memudahkan manusia (wisatawan) untuk memenuhi kebutuhannya

Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya (Yoeti,2002).

Pariwisata adalah sejumlah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan keluar masuk dan berdiamnya orang-orang asing dalam suatu kota, daerah atau negara (Pitana dan Gayatri,2005).

Pengertian teknis tentang pariwisata dimaksudkan sebagai keseluruhan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan berdiamnya orang-orang asing serta pelayanan tempat tinggal sementara, dengan pengertian berdiam bukan untuk menetap tinggal dan tidak memperoleh penghasilan dari kegiatannya tersebut.

Prasarana kepariwisataan adalah segala bentuk organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada daerah tujuan wisata, semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan untuk menginap dan tinggal, semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga di tempat tujuan wisata.

## b. Jenis-jenis Prasarana

(Yoeti, 2002) membagi prasarana menjadi dua bagian, yaitu; prasarana ekonomi (*economic infrastructure*) dan prasarana sosial (*social infrastructure*).

Prasarana ekonomi mencakup; transportasi, komunikasi, *utilities* (air, listrik serta sumber-sumber energi lain) dan sistem perbankan.

Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang dan menjamin kelangsungan industri wisata itu sendiri, seperti; lembaga pendidikan pendukung (*school system*), layanan kesehatan (*health service facilities*), keamanan (*safety*), dan aparat dan petugas (*government apparatus*).

(Salah Wahab 2005) membagi prasarana menjadi dua bagian penting, yakni;

- 1). Prasarana umum adalah prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak (*publik*) yang pengadaannya bertujuan untuk membantu kelancaran roda perekonomian, seperti listrik, air bersih, jaringan jalan dan transportasi, irigasi dan telekomunikasi. Untuk ketersediaan kebutuhan dasar dari kehidupan bermasyarakat adalah seperti; rumah sakit, apotek, bank, kantor pos, SPBU dan administrasi pemerintahan.
- 2). Prasarana kepariwisataan diantaranya, segala bentuk organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada daerah tujuan wisata, *residential tourist plant*; semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan untuk menginap dan tinggal, dan *recreative and sportive plant*; semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga di tempat tujuan wisata.

## 2. Retribusi Daerah

### a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, penerimaan retribusi daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### b. Objek Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut UU. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, objek retribusi terdiri dari :

#### 1). Jasa Umum

adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### 2). Jasa Usaha

adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta





### 3). Perizinan Tertentu

adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### c. Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah dibagi atas 3 golongan :

##### 1). Retribusi Jasa Umum

adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria penetapan :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

## 2). Retribusi Jasa Usaha

adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor sektor swasta.

Kriteria Penetapan :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

## 3). Retribusi Perizinan Tertentu

adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang lain pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Kriteria penetapan :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut sangat diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberi kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan Peraturan Pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

### 3. Retribusi Usaha Kepariwisata

#### a. Pengertian Retribusi Usaha Kepariwisata

Menurut Peraturan Daerah No. 24 tahun 2007, retribusi usaha kepariwisataan adalah biaya yang dipungut atas pelayanan sektor pariwisata yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Jadi, penerimaan retribusi usaha kepariwisataan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan biaya atas pelayanan sektor pariwisata yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

#### b. Pengertian Objek Retribusi Usaha Kepariwisataaan

Objek retribusi usaha kepariwisataan adalah pelayanan atas pemberian izin usaha kepariwisataan dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

#### c. Pengertian Subjek Retribusi Usaha Kepariwisataaan

Subjek retribusi usaha kepariwisataan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian izin usaha kepariwisataan dan jasa usaha kepariwisataan.

#### d. Pengerian Wajib Retribusi Usaha Kepariwisataaan

Wajib retribusi usaha kepariwisataan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha kepariwisataan.

### 4. Tarif Retribusi Usaha Kepariwisataaan

Tarif retribusi adalah nilai rupiah dan persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

Cara mengukur tingkat retribusi adalah pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi usaha kepariwisataan berdasarkan biaya penyediaan jasa dibidang pariwisata.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Usaha Objek Pariwisata

1). Wisata alam/tahun

a). Luas sampai dengan 1 ha Rp. 1.000.000/lokasi

b). Luas di atas 1 ha Rp. 2.000.000/lokasi

2). Wisata sejarah dan budaya/tahun Rp. 250.000/lokasi

3). Kawasan Benteng Kuto Besak

a). memasuki objek wisata BKB

1. Anak-anak Rp. 500/orang

2. Dewasa Rp. 1.000/orang

b). Memasuki plaza dan panggung BKB Rp. 2.000.000/hari

c). Mengunjungi Museum SMB II Rp. 1.000/orang

d). Memakai halaman museum SMB II Rp. 750.000/hari

e). Mengunjungi Monpera Rp. 1.000/orang

f). memakai halaman monpera Rp. 750.000/hari

g). Tambat labuh di Dermaga Wisata Sungai Musi :

1.Speed Boat ukuran kecil Rp. 1.500/tambat

2.Speed Boat ukuran besar Rp. 3.000/tambat

3. Ketek Rp. 1.000/hari

4. Jukung Rp. 3.000/hari

5. Gandeng / Tug Boat Rp. 2.500/hari

6. Tongkang kayu Rp. 4.000/hari



7. Tongkang besi	Rp. 5.000/hari
8. Kapal pinichel / layar	Rp. 6.000/hari
9. Memasuki dermaga wisata sungai musi	Rp. 1.000/hari
h). Fasilitas Umum	
1). Kios cinderamata / Kantin	Rp. 250.000/bulan
2). Tarif masuk kendaraan :	
a. Mobil	Rp. 2.000
b. Motor	Rp. 1.000
3). WC umum :	
a. Buang air besar	Rp. 2.000/orang
b. Buang air kecil	Rp. 1.000/orang
B. Usaha Wisata Tirta	
1). Klasifikasi Besar	Rp. 1.000.000
2).Klasifikasi menengah	Rp. 500.000
3).Klasifikasi kecil	Rp. 250.000
C. Usaha Hotel/tahun	
1). Hotel berbintang 5	Rp. 30.000.000/lokasi
2). Hotel berbintang 4	Rp. 25.000.000/lokasi
3). Hotel berbintang 3	Rp. 20.000.000/lokasi
4). Hotel berbintang 2	Rp. 10.000.000/lokasi
5). Hotel berbintang 1	Rp. 5.000.000/lokasi
6).Apartemen	RP. 20.000.000/lokasi

7).Cottage	Rp. 15.000.000/lokasi
8).Melati	Rp. 4.000.000/lokasi
9).Wisma/mess	Rp. 2.000.000/lokasi
10). Penginapan	Rp. 1.500.000/lokasi
11). Tempat kos	Rp. 3.000.000/lokasi
D. Restoran/tahun	
1). Besar	Rp. 5.000.000/lokasi
2). Menengah	Rp. 3.000.000/lokasi
3). Kecil	Rp. 1.000.000/lokasi
E. Rumah makan/tahun	
1). Besar	Rp. 3.000.000/lokasi
2). Menengah	Rp. 2.000.000/lokasi
3). Kecil	Rp. 1.000.000/lokasi
F. Cafe/tahun	Rp. 5.000.000/lokasi
G. Jasa Boga/tahun	
1). Besar	Rp. 3.000.000/lokasi
2). Menengah	Rp. 2.000.000/lokasi
3). Kecil	Rp. 1.000.000/lokasi
H. Perjalanan Wisata/tahun	
1). Besar	Rp. 5.000.000/lokasi
2). Menengah	Rp. 3.000.000/lokasi
3). Kecil	Rp. 1.000.000/lokasi

## I. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment)

### 1). Tempat Rekreasi/tahun

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| a). Kolam pemancingan  | Rp. 1.000.000/lokasi |
| b). Dunia fantasy      | Rp. 5.000.000/lokasi |
| c). Pertunjukan sirkus | Rp. 500.000/lokasi   |
| d). Kolam renang       | Rp. 1.000.000/lokasi |

### 2). Hiburan umum/tahun

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| a). Sanggar seni/tari       | Rp. 200.000/lokasi   |
| b). Gedung serbaguna        |                      |
| sampai dengan 500 kursi     | Rp. 1.000.000/lokasi |
| 501 kusi ke atas            | Rp, 1.500.000/lokasi |
| c). Bar                     | Rp. 5.000.000/lokasi |
| d). Klub malam              | Rp. 5.000.000/lokasi |
| e). Diskotik                | Rp. 5.000.000/lokasi |
| f). Karaoke                 |                      |
| 1 sampai dengan 10 kamar    | Rp. 2.500.000/lokasi |
| 10 kamar ke atas            | Rp. 5.000.000/lokasi |
| g). Bilyard                 | Rp. 500.000/lokasi   |
| h). Tempat olah raga        |                      |
| 1. Usaha gelanggang bowling | Rp. 1.000.000/lokasi |
| 2. Usaha fitness            | Rp. 200.000/lokasi   |
| 3. Usaha Futsal             | Rp. 300.000/lokasi   |



## i). Pertunjukan musik/festival

1. Besar	Rp. 1.000.000/hari
2. Menengah	Rp. 500.000/hari
3. Kecil	Rp. 250.000/hari

## j). Pertunjukan Artis

1. Internasional	Rp. 500.000/hari
2. Nasional	Rp. 250.000/hari

k). Impresariat/Event Organization (EO)/tahun Rp. 500.000/lokasi

l). Perusahaan Cinderamata/tahun Rp. 250.000/lokasi

## 5. Mekanisme Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataaan

Retribusi usaha kepariwisataan dipungut dalam daerah. Menurut Keputusan Wali Kota Palembang No. 12 Tahun 2004, mekanisme pemungutan retribusi usaha kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.
- b. Pemeriksaan berkas untuk diteliti kelengkapan persyaratannya dan kemudian dicatat pada buku agenda.
- c. Proses administrasi Subdin Sarana dan Jasa Usaha Kepariwisataaan / Objek dan Daya Tarik Wisata.
- d. Pengecekan ke lokasi oleh tim untuk persyaratan teknis.
- e. Penetapan izin oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.



- f. Pembayaran retribusi.
- g. Pemberian izin oleh Kepala Dinas.

#### 6. Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai UU No. 18 Tahun 1997 pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan pentetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, iya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi tentang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi

berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### 7. Faktor-Faktor Penyebab belum Optimalnya Penerimaan Retribusi

Menurut Susilo (2000:44), faktor-faktor penyebab belum optimalnya penerimaan retribusi adalah sebagai berikut :

##### a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal meliputi :

1. Organisasi dan perencanaan
2. Peraturan Daerah, system prosedur
3. Koordinasi dan kemampuan personil
4. Analisa dan pengawasan
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki

##### b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal meliputi :

1. Kesadaran wajib retribusi
2. Pertumbuhan objek penerimaan
3. Perekonomian daerah
4. Kebijakan pemerintah
5. Kondisi objek penerimaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiono (2001:11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel / lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan cara membandingkan teori dengan pelaksanaan di lapangan.

#### **B. Tempat Penelitian**

Penelitian ini di lakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang berlokasi di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2 Telp (0711) 358450, Palembang 30132.



### C. Operasionalisasi Variabel

Adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diakui.

**Tabel III. 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator variabel
1. Prasarana Kepariwisataaan	Segala bentuk organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada daerah tujuan wisata	a. Prasarana Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem transportasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Transportasi darat                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi jaringan jalan</li> <li>2. Terminal</li> </ol> </li> <li>b. Transportasi sungai</li> <li>c. Transportasi kereta api</li> </ol> </li> <li>2. Komunikasi</li> <li>3. Listrik</li> </ol> b. Prasarana Sosial <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Olah raga dan retribusi</li> <li>3. Penginapan</li> <li>4. Rumah makan</li> <li>5. Toko souvenir</li> </ol>
2. Retribusi Usaha Kepariwisataaan	Penerimaan daerah yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan	a. Faktor internal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi dan perencanaan</li> <li>2. Peraturan daerah, sistem prosedur</li> <li>3. Koordinasi dan kemampuan personil</li> <li>4. Analisa dan pengawasan</li> <li>5. Sarana dan prasarana yang dimiliki</li> <li>6. Sanksi wajib retribusi</li> <li>7. Insentif</li> </ol> b. Faktor eksternal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib retribusi</li> <li>2. Pertumbuhan objek penerimaan</li> <li>3. Prekonomian daerah</li> <li>4. Kebijakan pemerintah</li> <li>5. kondisi objek penerimaan</li> </ol>

Sumber : Penulis, 2009

#### **D. Data yang Diperlukan**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:147), data terdiri dari :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Palembang berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan dinas tersebut.

Data sekunder meliputi : peraturan daerah tentang retribusi usaha kepariwisataan, struktur organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Palembang, target dan realisasi retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang tahun 2007-2009, mekanisme pemungutan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang, struktur dan besarnya tarif retribusi usaha kepariwisataan.



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nan Lin (dalam Gulo,2002:116-123), teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. tentang berbagai kegiatan / peristiwa pada waktu lalu. Pengamatan (observasi)

Adalah pengamatan metode pengumpulan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey

Adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

3. Wawancara

Adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuesioner

Adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat Tanya.

5. Dokumentasi

Adalah catatan tertulis

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.



## **F. Analisa Data dan Teknik Analisa**

Menurut Soeranto dan Arsyad (2003:126), analisa data terdiri dari :

### 1. Analisa Kualitatif

Adalah analisa yang digunakan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monologis, atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris.

### 2. Analisa Kuantitatif

Adalah analisa yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Teknik analisa dalam penelitian ini dengan menyajikan uraian penjelasan mengenai peranan prasarana usaha kepariwisataan dan menguraikan tentang retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang terkait dengan pengaruhnya terhadap retribusi daerah Kota Palembang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Singkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang adalah salah satu dinas dalam jajaran Pemerintah Kota Palembang yang berwenang dalam menangani masalah kepariwisataan Kota Palembang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang berada di lantai bawah Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Nama Sultan Mahmud Badaruddin diabadikan di museum tersebut untuk mengingat dan menghargai jasa-jasa Sultan Mahmud Badaruddin II atas perlawanannya terhadap Belanda. Adapun sejarah tentang keberadaan gedung itu sendiri dimulai dari keberadaan keraton Sultan Mahmud Badaruddin I (karena beliau yang membangun keraton tersebut) yang pembangunannya bersama-sama dengan Benteng Kuto Besak (BKB). Oleh karena itu, ada juga yang menyebutnya dengan keraton Kuto Besak.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang terletak di dekat Jembatan Ampera dan tepian Sungai Musi serta di belakang Monumen Penderitaan Rakyat (monpera). Gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini sebelumnya merupakan lokasi Benteng Kuto Lamo dan terletak pada areal yang sama dengan BKB dan dibangun oleh pangeran Jayo Wikramo (SMB I) mulai tahun 1780 sampai 1797 dengan luas 1,5 Ha, panjang 32 m dan lebar 22 m lalu dibongkar habis oleh Belanda pada tahun 1823 dan bersamaan dengan pembongkaran dinding bagian depan BKB. Adapun pembongkaran tersebut untuk

menghilangkan “monumental” Kesultanan Palembang. Lalu dari pembongkaran bangunan keraton tersebut dibangun kembali gedung dengan gaya Eropa oleh Mr. Joan Isaac Van Sevenhoven yang selesai pada tahun 1825. Dengan dibongkarnya Keraton Benteng Kuto Besak berarti berakhir pula Kesultanan Palembang pada tanggal 7 Oktober 1823. Kemudian pada tahun 1825 gedung ini dijadikan Komisariat Pemerintah Hindian Belanda untuk wilayah Sumatera bagian Selatan sekaligus sebagai Kantor Residen.

Pada saat jepang menduduki Palembang, gedung ini dijadikan sebagai tempat butai (barak) tentara jepang (kepala). Kemudian pada tahun 1946 sampai dengan 1949 Belanda kembali menduduki gedung ini. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatannya pada tahun 1949 gedung tersebut dijadikan kantor Triterium II Sriwijaya. Pada tahun 1960 sampai dengan 1974 bangunan ini digunakan sebagai Resimen Induk Daerah Militer (rendam) IV Sriwijaya dan baru pada akhir tahun 1974 kembali kepada Pemerintahdaerah tingkat II Kota Madya Palembang.

Pada tahun 1977 lantai dibawah bangunan tersebut dijadikan kantor Bapparda (Badan Pengembangan Pariwisata Daerah) hingga keluarnya keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 559/KPTS/IV/84 tanggal 3 Oktober 1984 yang isinya antara lain menyebutkan tentang Pembentukan Cabang Dinas (Cabdin) Pariwisata Kotamadya Palembang yang bersama-sama Cabdin Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin bergabung ke Bapparda yang terpusat di Palembang. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1990 terbentuklah Dinas Pariwisata Kota Madya Palembang di bawah Parpostel



(Pariwisata, Pos, Perhubungan, dan Telekomunikasi). Lalu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan terjadi perubahan dari pola minimal ke pola maksimal yang semakin memperluas ruang lingkup kerja dinas Pariwisata. Hingga akhirnya terjadi perubahan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2001 tanggal 19 maret 2001 bersamaan dengan direalisasikannya Otonomi Daerah, Dinas Pariwisata Kotamadya Palembang menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

“Mewujudkan pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas.

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kepariwisataan.
2. Pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkokoh jati diri.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas objek dan daya tarik wisata.
4. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
5. Meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kota Palembang.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaan serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, dan Setda Kota Palembang).



## Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang disusun sedemikian rupa yang menunjukkan hubungan di antara bagian atau bidang kerja maupun orang yang melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dari setiap bentuk usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Kepala Bagian Tata Usaha
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Kepegawaian
  3. Sub Bagian keuangan
- d. Sub Dinas Program
  1. Seksi Penyusunan Program
  2. Seksi Data dan Informasi
  3. Seksi Evaluasi, Pelaporan, dan Retribusi
- e. Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata
  1. Seksi Objek Wisata
  2. Seksi Atraksi Wisata
  3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
- f. Sub Dinas Sarana Jasa Usaha Pariwisata
  1. Seksi Akomodasi

2. Seksi Rumah Makan dan Bar
3. Seksi Perizinan
4. Seksi Aneka Usaha Jasa Wisata

g. Sub Dinas Pemasaran Wisata

1. Seksi Pelayanan Wisata
2. Seksi Bahan Promosi
3. Seksi Promosi
4. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

h. Sub Dinas Kebudayaan

1. Seksi Sejarah dan Budaya
2. Seksi Permuseuman dan Purbakala
3. Seksi Kesenian

i. Cabang Dinas

1. Kepala Cabang Dinas
2. Unsur Staf / Petugas Administrasi
3. Unsur Lini / Petugas Teknik Operasional
4. Kelompok Jabatan Fungsional

j. Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

1. Kepala UPTD
2. Unsur Staf / Petugas Administrasi
3. Unsur Lini / Petugas Teknik Operasional
4. Kelompok Jabatan Fungsional



## k. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1. Sub-Sub Kelompok

#### Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

##### A. Kepala Dinas

1). Kepala Dinas mempunyai tugas memberi petunjuk, membina, meringkang, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

2). Kepala Dinas berfungsi melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

##### B. Bagian Tata Usaha

1). Bagian Tata Usaha bertugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

2). Bagian Tata Usaha berfungsi :

- a). Pengelolaan administrasi kepegawaian
- b). Pengelolaan administrasi keuangan
- c). Pengelolaan urusan umum
- d). Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

3). Bagian Tata Usaha terdiri dari

a). Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan rumah tangga dan kepegawaian dinas.



b). Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian Bertugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan, dan mensistimasikan data kepegawaian.

c). Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

C. Sub Dinas Program

1). Sub Dinas Program bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan informasi, melakukan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan retribusi.

2). Sub Dinas Program berfungsi :

- a). Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepariwisataan.
- b). Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di bidang kepariwisataan.
- c). Pelaksanaan evaluasi pelaporan dan pengolahan retribusi.

3). Sub Dinas Program terdiri dari :

- a). Seksi Penyusunan Program
- b). Seksi Data dan Informasi
- c). Seksi Evaluasi, Pelaporan, dan Retribusi

D. Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata

1). Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata bertugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kegiatan objek dan daya tarik wisata.

2). Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata berfungsi :

- a). melakukan inventarisasi, perencanaan, penataan dan pengembangan, pembinaan terhadap objek dan kawasan wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- b). memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum

E. Sub Dinas Sarana Jasa Usaha Pariwisata

1). Sub Dinas Sarana Jasa Usaha Pariwisata bertugas menyediakan, membangun, dan mengelola sarana prasarana wisata yang ada.

2). Sub Dinas Sarana Jasa Usaha Pariwisata berfungsi :

- a). Membangun sarana prasarana usaha wisata.
- b). Merawat maupun mengelola sarana usaha wisata.
- c). Mengatur perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.
- d). menyediakan bahan pembinaan kegiatan akomodasi.

3). Sub Dinas Sarana Jasa Usaha Pariwisata terdiri dari :

- a). Seksi Akomodasi
- b). Seksi Rumah Makan dan Bar
- c). Seksi Aneka Usaha Jasa Wisata
- d). Seksi Perizinan

F. Sub Dinas Pemasaran Wisata

1). Sub Dinas Pemasaran Wisata bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta melakukan publikasi, promosi, pameran, nilai kesenian,

budaya, event kepariwisataan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik dalam maupun luar negeri serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi untuk perencanaan ke depan.

2). Sub Dinas Pemasaran Wisata berfungsi :

- a). Menyiapkan bahan publikasi berupa buku, leaflet, video, foto dan lain-lain.
- b). Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap setiap mitra kerja yang akan melakukan promosi dan event kepariwisataan.
- c). Melakukan publikasi, promosi, pameran, nilai budaya, event-event kepariwisataan baik dalam skala local, regional, nasional dan internasional.
- d). Melakukan pemantauan dan kunjungan wisata yang datang ke Palembang, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara secara periodik minimal setiap tiga bulan.
- e). Menyiapkan bahan laporan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara setiap akhir tahun dan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada.

3). Sub Dinas Pemasaran Wisata terdiri dari :

- a). Seksi Pelayanan Wisata
- b). Seksi Bahan Promosi
- c). Seksi Promosi
- d). Seksi Penyuluhan dan Pelatihan



### G. Sub Dinas Kebudayaan

1). Sub Dinas Kebudayaan bertugas mengumpulkan bahan pembinaan, penataan, pengembangan dan pengamanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap bangunan dan tempat-tempat bersejarah serta budaya.

2). Sub Dinas Kebudayaan berfungsi :

- a). Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta membuat laporan mengenai sejarah dan budaya.
- b). Melakukan penataan, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengamanan serta pelestarian tempat-tempat dan bangunan bersejarah, seni dan budaya serta adat dan istiadat.
- c). Menyusun konsep dan acuan petunjuk pembinaan terhadap pelestarian bangunan-bangunan yang dilindungi oleh cagar budaya.
- d). Membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer.
- e). Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesenian.

3). Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a). Seksi sejarah dan budaya
- b). Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c). Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional
- d). Kelompok Jabatan Fungsional



## J. Kelompok jabatan fungsional

- 1). Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala UPTD yang bersangkutan.
- 3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja.

## **2. Koordinasi Penerimaan Retribusi Usaha Kepariwisataaan di Kota Palembang**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Penerimaan retribusi untuk Kota Palembang meliputi beberapa objek penerimaan yang salah satunya adalah penerimaan retribusi usaha kepariwisataan. Penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang di peroleh dari pemungutan retribusi berupa kawasan objek wisata, wisata tirta, hotel, restoran, dan lain-lain yang saling mendukung satu sama lain. Artinya penerimaan retribusi usaha kepariwisataan bukan hanya berasal dari sektor pariwisata saja, akan tetapi juga berasal dari sarana pendukung lainnya seperti hotel, restoran, dan lain-lain.

Penerimaan retribusi usaha Kepariwisataaan Kota Palembang selama 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2007-2009 mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah



Kota Palembang, persentase pencapaian penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang tahun 2009 yaitu sebesar 37,59 %. Sebagai salah satu jenis penerimaan retribusi di Kota Palembang, maka perlu di ketahui pengaruh penurunan penerimaan retribusi usaha kepariwisataan terhadap penerimaan retribusi daerah. Sebab persentase penerimaan retribusi daerah Kota Palembang mengalami penurunan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2007-2009. Artinya penerimaan retribusi daerah Kota Palembang selama 3 tahun tersebut tidak mencapai target yang telah di tetapkan. (Terlampir).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang menargetkan pendapatan dari retribusi sektor pariwisata tahun 2009 meningkat hingga 100 %. Sikap optimis tersebut didorong dengan diluncurkannya visit musi 2009. Sebagai kota tua dan bermukim kerajaan dan kesultanan, di Kota Palembang banyak terdapat objek wisata sejarah dan potensi wisata sungai yang jarang terdapat di daerah lain. Wisatawan yang datang masih di dominasi dari daratan Asia dan beberapa dari Benua Amerika. Melalui program Visit Musi 2009, diharapkan turis dari daratan Eropa dan lainnya juga akan mengunjungi kekayaan Kota Palembang. Sesungguhnya bukan hanya objek wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, tapi kerajinan dan kesenian serta budaya seperti tenun songket dan makanan khas juga merupakan daya tarik wisata, tapi kerajinan dan kesenian serta budaya seperti tenun songket dan makan khas juga merupakan daya tarik wisata. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Kota Palembang, maka objek wisata tersebut tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sarana dan Prasarana pendukung objek wisata tersebut adalah hotel, restoran,

rumah makan, cafe, jasa boga, perjalanan wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, tempat olahraga, serta sarana transportasi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pendukung tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 27 November 2007 Tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan, maka disosialisasikan kepada subjek retribusi, yaitu orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian izin usaha kepariwisataaan dan jasa usaha kepariwisataaan berupa :

I. a. Izin Kawasan Objek Wisata

- Wisata Alam
- Wisata Sejarah Budaya
- Memasuki Kawasan Benteng Kuto Besak

b. Izin Usaha Wisata Tirta, Berupa Transportasi wisata

c. Izin Usaha Hotel

d. Izin Usaha Restoran

e. Izin Usaha Rumah Makan

f. Izin Usaha Cafe

g. Izin Usaha Jasa Boga

h. Izin Usaha Perjalanan Wisata

i. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

j. Izin Tempat Olah Raga

II. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha kepariwisataan dan usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

III. Ketentuan pidana bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah.

Tarif retribusi usaha kepariwisataan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dirasakan terlalu besar. Khususnya untuk beberapa tempat wisata di Kota Palembang yang sering disewakan. Misalnya plaza dan panggung BKB yaitu sebesar Rp.2.000.000/hari. Masyarakat pada umumnya mengeluh akan mahalnnya tarif retribusi yang harus dibayar jika mereka menyewa lapangan BKB untuk acara-acara tertentu. Padahal mereka harus mempersiapkan tenda dan sebagainya. Persiapan tersebut tentunya menghabiskan waktu paling cepat 1 hari. Waktu yang digunakan untuk persiapan tersebut juga dihitung retribusinya. Pihak-pihak yang menyewa lapangan BKB tersebut rata-rata adalah pihak yang akan mengadakan acara-acara hiburan saja, bukan untuk acara pernikahan atau acara-acara tertentu. Jadi, jarang sekali masyarakat yang menyewa lapangan BKB tersebut. Padahal lapangan BKB tersebut juga harus dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Sanksi (ketentuan pidana) bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran juga sangat tegas yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Jadi, jarang sekali wajib retribusi yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah. Akan tetapi, kesadaran wajib retribusi di Kota Palembang masih kurang. Para wajib



retribusi yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Palembang sering kali menolak untuk membayar retribusi yang ditagih oleh para petugas. Misalnya : Tempat Wisata BKB dan Monpera. Para pengunjung sering menghindar dan menolak untuk membayar retribusi yang hanya sebesar Rp.500 untuk anak-anak dan RP.1.000 untuk dewasa. Mereka beranggapan bahwa jika mengunjungi tempat wisata tersebut tidak seharusnya dipungut retribusi (dijelaskan oleh salah satu pengunjung BKB dan Monpera serta dijelaskan oleh salah satu petugas penagih retribusi). Padahal penagih retribusi tersebut betul-betul petugas penagih retribusi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yaitu terdiri dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana tersebut tentunya memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal itu tergantung pada jumlah sumber daya manusia tersebut dalam melaksanakan tugasnya serta juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang yang mendukung pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sebanyak 145 orang yang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 67 orang tenaga honorer.

## 2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sebagai berikut :

- a. Tanah
- b. Bangunan tempat kerja dan tempat tinggal
- c. Bangunan bersejarah
- d. Sarana dan prasarana wisata
- e. Kendaraan bermotor
- f. Inventaris kantor
- g. Sarana dan prasarana kantor

Jadi, setiap karyawan memiliki tugasnya masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ditunjang oleh sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang disetor ke dalam kas Pemerintah Daerah dan disalahgunakan oleh perugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar retribusi dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan retribusi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang terdiri dari 145 karyawan. Masing-masing karyawan memiliki tugas yang berbeda-beda. Setiap personil harus dapat bekerjasama satu sama lain melalui koordinasi di antara mereka. Koordinasi dan kemampuan personil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang masih kurang baik. Seringkali



terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas di lapangan. Mereka bekerjasama untuk melakukan penyelewengan terhadap uang yang seharusnya disetor ke kas daerah. Prosedur yang telah ditetapkan tidak ditaati oleh para petugas dan kurangnya kesadaran untuk berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya serta kurangnya koordinasi yang baik diantara sesama petugas. Meskipun banyak terjadi penyelewengan, akan tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang jarang melakukan pengawasan terhadap para petugas di lapangan. Sebagai contoh, para petugas bisa dengan leluasa melakukan kecurangan tanpa adanya rasa takut terhadap sanksi yang ada.

Hal ini juga dipicu oleh kurangnya pemberian insentif kepada para karyawan. Padahal pemberian insentif diperlukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Artinya, dengan adanya pemberian insentif kepada para karyawan maka akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Sehingga mereka merasa bahwa kerja keras yang telah mereka lakukan dapat dihargai dan tidak sia-sia. Akan tetapi, Pemerintah Kota Palembang kurang memperhatikan hal tersebut. Pemberian insentif untuk para karyawan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang kurang memuaskan bahkan hamper tidak ada. Hal ini menyebabkan para karyawan pada dinas tersebut mengambil keuntungan dari penarikan retribusi usaha Kepariwisata Kota Palembang. Gaji yang mereka terima setiap bulan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (dijelaskan oleh salah satu petugas penagih retribusi pada salah satu tempat wisata di Kota Palembang). Tentunya dengan adanya tindakan tersebut maka uang yang seharusnya disetor ke kas tidak sepenuhnya disetorkan oleh para petugas.



Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Palembang juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi usaha kepariwisataan. Data yang ada pada dinas tersebut juga tidak ditutup-tutupi, bahkan disebarluaskan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi usaha kepariwisataan melalui peran serta masyarakat. Bahkan persyaratan mekanisme dan prosedur tetap pemberian izin usaha kepariwisataan sangat jelas yaitu sebagai berikut :

**Gambar IV. 1**

**SKEMA PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**



**Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang**

Keterangan : 1 = Dikembalikan untuk perbaikan dan kelengkapan persyaratan

2 = Dikembalikan untuk perbaikan dan kelengkapan persyaratan

Objek penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang yaitu terdiri dari kawasan objek wisata, wisata tirta, hotel, restoran, rumah makan, café, jasa boga, perjalanan wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, dan tempat olahraga. Objek penerimaan retribusi usaha kepariwisataan kota Palembang memang cukup banyak. Akan tetapi, dari tahun ke tahun tempat wisata yang ada di kota Palembang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah hanya melakukan perbaikan dan pemeliharaan saja tanpa adanya usaha untuk menambah tempat wisata yang baru. Padahal untuk meningkatkan retribusi perlu ditingkatkan objek penerimaannya. Sebab pengunjung akan merasa bosan untuk mengunjungi tempat wisata yang sama setiap hari libur. Objek wisata yang ada di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- Benteng Kuto Besak
- Jembatan Ampera
- Kantor Ledeng
- MONPERA
- Museum SMB II Palembang
- Pulau Kemaro
- Sungai Musi
- Bagus Kuning
- Mesjid Agung
- Bukit Siguntang
- Benteng Kuto Gawang
- Pasar 16 Ilir



- Mesjid Lawang Kidul
- Boom Baru
- Kambang Koci
- Kawah TengkuREP
- Guguk Jero Pager Palembang lam
- Makam Sultan Agung
- Makam Ki Gede Ing Suro
- Sungai Gerong dan Pertamina
- Al Munawar dan Kapten Arab
- Sabokingking

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek wisata di Kota Palembang didukung oleh sarana dan prasarana pendukung lainnya yang salah satunya adalah hotel. Hotel yang ada di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- Hotel Aston
- Hotel Horison
- Hotel Sandjaja
- Hotel Swarna Dwipa
- Novotel Palembang Hotel & Residence
- Quality Daira Hotel
- Hotel lembang
- Hotel Princess
- Royal Asia Hotel
- Hotel Anugrah

- Hotel Arjuna
- Hotel Budi
- Hotel Paradise
- Hotel Wisata
- Hotel Anida
- Hotel Rian
- Royal Cottage

Tempat wisata yang beranekaragam di Kota Palembang sangat mempengaruhi intensitas kunjungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi tempat rekreasi dan hiburan umum. Tempat rekreasi yang ada di Kota Palembang yaitu pemandian alam, kolam pemancingan, dunia fantasi, pertunjukan sirkus, dan kolam renang. Sedangkan tempat hiburan umum yang ada di Kota Palembang yaitu sanggar seni/tari, gedung serbaguna, bar, klub malam, diskotik, karaoke, bilyar, pertunjukan musik/festival, pertunjukan artis, impresariat/event organizer, dan perusahaan cinderamata. Dari sekian banyak tempat rekreasi dan hiburan umum tersebut, pengunjung tentunya sangat memperhatikan kondisi atau keadaan tempatnya. Tempat rekreasi dan hiburan umum yang ada di Kota Palembang masih di bawah standar kota-kota yang lain. Contoh: Fantasy Island (Dunia Fantasi) belum menyajikan wahana permainan seperti yang ada di Kota Jakarta.

Kota Palembang saat ini semakin semarak. Dengan ditetapkannya program Visit Musi 2008, geliat dunia usaha terutama dunia usaha yang bergerak di sektor industri pariwisata dan sector lainnya kini semakin menambah dinamika Kota



Palembang. Pemerintah telah memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya, dan masyarakat telah mempersiapkan diri dengan peran serta dan peran aktifnya dalam memajukan pariwisata di Kota Palembang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prasarana kepariwisataan**

#### **a). Prasarana umum**

##### **1). Sistem Transportasi**

###### **a). Transportasi Darat**

###### **1). Kondisi Jaringan Jalan**

Dari wawancara yang telah dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang salah satu penyebab sulitnya wisatawan menuju tempat wisata adalah kondisi jalan yang tidak memadai serta padatnya lalu lintas yang menggunakan kendaraan pribadi serta jalur jalan yang ada di kota Palembang tidak menentu yang membuat wisatawan sulit untuk memahami jalur menuju tempat wisata. Untuk itu perlu adanya penyediaan kendaraan wisata menuju tempat-tempat wisata agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan memberikan kenyamanan khususnya wisatawan domestik.

###### **2). Terminal**

Salah satu peningkatan prasarana transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang adalah dengan mengoperasikan Terminal Karyajaya (tipe A) pada tahun 2001 yang diharapkan secara berangsur dapat mengatasi kesemrawutan transportasi dalam kota dan antar kota, khususnya dalam menaikkan dan menurunkan penumpang bagi angkutan antar kota agar tidak



melakukan di dalam Kota Palembang. Lokasi yang jauh dari pusat kota yang menjadi kendala para wisatawan dan juga tidak terturnya tempat pemberhentian, serta fasilitas yang ada tidak di urus dengan baik.

#### b. Transportasi Sungai

Akses yang disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang melalui sungai menuju objek wisata juga dilakukan dengan menggunakan ketek ( sampan bermotor yang mampu memuat sampai 12 orang dan memiliki rute trayek yang tetap). Tapi para wisatawan takut untuk menaikinya dikarenakan ketek yang mereka naiki terlalu kecil sehingga para wisatawan tidak berminat untuk melihat-lihat keindahan sungai musi dan ketempat wisata lainnya. Untuk itu pengadaan kapal seperti kapal pesiar yang disediakan khusus para wisatawan agar para wisatawan nyaman menuju objek wisata yang ada dikota Palembang dengan menggunakan sarana sungai.

#### c. Transportasi Kereta Api

Pelayanan kereta api merupakan pelayanan dengan skala regional, di mana Kota Palembang merupakan awal dan akhir tujuan penumpang. Ujung stasiun kereta api terletak di Desa Karya Jaya, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati. Namun kurangnya fasilitas yang ada di stasiun menjadi kendala utama serta sering terlambatnya kereta datang dan berangkat tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan sehingga mengakibatkan terlambatnya keberangkatan dan kedatangan pengunjung wisatawan.



## 2. Komunikasi

Kurangnya pemberitahuan melalui media elektronik maupun media cetak yang mengakibatkan ketidak tahuan para wisatawan tentang objek wisata yang ada di Kota Palembang. Untuk itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang perlu mengkomunikasikan melalui media elektronik dan media cetak tentang objek wisata dan kebudayaan yang ada di Kota Palembang sehingga wisatawan dapat mengetahui tempat-tempat wisata dan tertarik untuk mengunjungi Kota Palembang.

## 3. Listrik

Listrik sampai saat ini merupakan salah satu sumber energi yang sangat efisien. Keuntungan pemakaian listrik adalah bebas polusi, mudah dimanfaatkan, hemat energi, biaya cukup murah dan stabil. Listrik sebenarnya juga berpotensi ekonomis, yaitu merangsang pertumbuhan industri wisata dan penggunaan barang elektronika. Namun listrik yang ada sering mengalami pemadaman, seharusnya pada tempat-tempat wisata listrik tidak dipadamkan sehingga para wisatawan tidak terganggu dalam menjalankan aktifitasnya.

### **b). Prasarana sosial**

#### 1). Pendidikan

Sarana pendidikan kepariwisataan yang ada di Kota Palembang sampai saat ini masih minim. Sarana kepariwisataan sangatlah penting karna dengan adanya pendidikan kepariwisataan masyarakat lebih bisa memahami budaya serta bisa memperluas sarana dan prasarana dan membangun perekonomian Kota

Palembang melalui Pariwisata, contohnya dengan adanya pemilihan bujang dan gadis Palembang diharapkan agar bisa mempromosikan kepada masyarakat luas tentang budaya dan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Untuk itu pemerintah Kota Palembang harus mendirikan lebih banyak lagi sarana Pendidikan pariwisata.

## 2). Olah Raga dan Rekreasi

Pada umumnya bangunan atau kawasan bagi fasilitas hiburan atau rekreasi tidak terdapat pada semua bagian wilayah kota, sehingga perlu digali potensi yang ada pada masing-masing wilayah kota tersebut. Untuk Kota Palembang, potensi yang ada dan perlu dikembangkan adalah Pulau Kerto di Kecamatan Ilir Barat II, kawasan Bukit Siguntang, kawasan Situs Karanganyar, hutan lindung Puntikayu, daerah Civic Centre sekitar Benteng Kuto Besak, Kawah Tengkreup, kawasan industri Minyak Plaju Sei Gerong, Industri Pupuk Pusri, serta kawasan tepian perairan sungai Musi yang perlu digali lebih jauh potensi yang dimilikinya. Sedangkan bangunan hiburan lainnya seperti bioskop secara kuantitas sudah cukup yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dan penyebarannya.

Sedangkan penyediaan fasilitas olah raga hendaknya memperhatikan skala pelayanan sampai tingkat kelurahan-lingkungan. Kebutuhan fasilitas dasar tersebut, adalah lapangan olah raga serba fungsi (sepak bola/voli/bola basket) dan gedung olah raga yang dapat disatukan dengan gedung kesenian. Penyediaan kebutuhan berdasarkan standar minimal dengan skala pelayanan tingkat kelurahan lingkungan bagi fasilitas olah raga dan pusat kompleks fasilitas olah raga dengan skala pelayanan tingkat kota regional.



### 3). Penginapan

Jumlah penginapan di Kota Palembang cukup memadai dengan adanya hotel-hotel berbintang yang bisa membuat wisatawan nyaman dalam menikmati liburan mereka, tetapi wisma juga perlu ditambahkan lebih banyak lagi karena para wisatawan belum tentu mampu dalam menyewa hotel berbintang.

### 4). Rumah makan

Pembinaan perlu dilakukan pada rumah makan yang belum memenuhi standar kesehatan, selain itu pembinaan dilakukan juga untuk memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan para wisatawan. Rumah makan yang menyediakan makanan khas Palembang sangatlah kurang dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Seharusnya masyarakat ikut serta dalam mengenalkan makanan-makanan khas Palembang dengan cara mendirikan rumah makan dekat dengan objek wisatanya.

### 5). Toko Souvenir

Jumlah toko souvenir masih sangat terbatas bahkan sangat minim dibandingkan dengan kota-kota lainnya, sebaiknya didirikan dekat dengan tempat wisatanya, maka para wisatawan tidak perlu mencari jauh-jauh souvenir apa yang akan dibawa pulang. Untuk itu pengembangan produk souvenir ini harus dilakukan dengan melakukan pelatihan terhadap masyarakat dan dunia usaha lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai

sistem kepariwisataan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat dapat dilakukan dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a). Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana objek wisata
- b). Pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana satuan pengembangan pariwisata dan wisata budaya atau sejarah
- c). Pengembangan aksesibilitas objek dan daya tarik wisata
- d). Pembangunan sekolah pariwisata

## **2. Retribusi Usaha Kepariwisataan dan Retribusi Daerah**

Penerimaan retribusi daerah kota Palembang tahun 2007-2009 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Terbukti bahwa persentase pencapaian retribusi daerah Kota Palembang selama tiga tahun tersebut selalu mengalami penurunan. Target penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang pada tahun 2009 meningkat yaitu sebesar Rp.862.500.000 sedangkan realisasi penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang menurun yaitu sebesar Rp.324.216.000. Target sebesar Rp.862.500.000 tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kota Palembang. Penetapan target tersebut ditetapkan berdasarkan pembebanan dari tiap sektor pariwisata di Kota Palembang. Target yang terbesar ditetapkan pada kawasan objek wisata dan hotel yaitu sebesar Rp. 300.000.000 untuk kawasan objek wisata dan Rp.150.000.000 untuk hotel. Sedangkan sisanya yaitu untuk sektor pariwisata lainnya yang terdiri dari wisata tirta, restoran, rumah makan, cafe, jasa boga, perjalanan wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, serta tempat olah raga.



Penurunan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang tahun 2009 tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Susilo, beberapa faktor penyebab belum optimalnya penerimaan retribusi yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut, ada yang merupakan penyebab penurunan penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang dan ada juga yang tidak.

Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam lingkungan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Faktor internal terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1). Organisasi dan Perencanaan

Organisasi dan perencanaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sudah cukup baik. Setiap program yang akan dijalankan direncanakan dengan seksama melalui diskusi bersama para pegawai. Pelaksanaan setiap program tersebut juga dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai. Setiap akhir tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang membuat perencanaan dalam bentuk Anggaran Pendapatan yang didasarkan pada usaha objek wisata, usaha wisata tirta, usaha hotel, restoran, rumah makan, cafe, jasa boga, perjalanan wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, serta tempat olah raga.

2). Peraturan Daerah, Sistem Prosedur

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pembinaan jasa usaha kepariwisataan Kota Palembang adalah peraturan daerah Nomor 24 tahun 2007 yang telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2007. salah satu isi Peraturan Daerah tersebut adalah mengenai tarif retribusi. Banyak masyarakat yang mengeluh bahwa tarif retribusi untuk beberapa tempat wisata di Kota Palembang terlalu besar. Contohnya yaitu penyewaaan Benteng Kuto Besak, penyewaan halaman museum SMB II, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan intensitas penyewaan tempat wisata tersebut menurun dan tentunya penerimaan retribusi juga menurun. Selain tarif penyewaan beberapa tempat wisata yang dirasakan terlalu besar, tarif untuk usaha rekreasi yang terdiri dari taman rekreasi, kolam pemancingan, dunia fantasi, pertunjukan sirkus, dan kolam renang dirasakan tidak adil, hal ini dikarenakan adanya perubahan dari pemerintah daerah sebelumnya yaitu tarif yang tadinya ditentukan berdasarkan per m<sup>2</sup> ternyata berdasarkan peraturan daerah yang baru ditentukan berdasarkan lokasi. Padahal kolam pemancingan dan kolam renang yang ada di Kota Palembang tidak sama luasnya. Hal ini hanya menguntungkan usaha rekreasi yang besar saja dan merugikan usaha rekreasi yang tergolong kecil.

### 3). Koordinasi dan Kemampuan Personil

Setiap karyawan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tentunya diperlukan suatu kerjasama atau koordinasi diantara mereka. Artinya dengan adanya koordinasi yang baik maka akan



memperoleh hasil yang baik pula. Akan tetapi, para para kryawan khususnya para petugas di lapangan sering menyalahgunakan kerjasama itu. Mereka sering bekerjasama untuk melakukan penyelewengan terhadap uang retribusi yang di pungut dari para pengunjung. Padahal uang retribusi tersebut seharusnya dikumpulkan untuk diserahkan ke kas daerah. Para petugas penagih retribusi hanya diperintahkan untuk menyerahkan seluruh penerimaan retribusi setiap harinya tanpa adanya bukti (catatan jumlah karcis yang terpakai). Hal ini tentunya membuka peluang bagi para petugas penagih retribusi untuk menyelewengkan uang retribusi setiap harinya. Jumlah pengunjung di Kota Palembang memang selalu meningkat, akan tetapi penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang tidak sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung tersebut. Hal ini tentunya disebabkan oleh ketidakjujuran para petugas dalam melaksanakan tugasnya.

#### 4). Analisa dan Pengawasan

Dalam menentukan peraturan yang ada, pemerintah terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya akan ditetapkan sebagai peraturan atau prosedur tersebut harus dilakukan pengawasan agar dapat terlaksana dengan baik, pada kenyataannya pengawasan agar dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi, pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang masih kuran baik. Jika dikaitkan dengan praktek penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lapangan, kurangnya pengawasan merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya praktek penyalah gunaan tersebut. Para petugas dengan mudah melakukan



kecurangan terhadap uang retribusi karena kurangnya pengawasan. Karyawan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang bertugas melakukan pengawasan memang tidak banyak, yaitu 9 orang. Mereka memang melakukan pengawasan, akan tetapi hanya dilakukan pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya saja. Sedangkan pengawasan tidak dilakukan terhadap para petugas di lapangan. Pengawasan untuk sektor pariwisata dan sektor pendukungnya juga kurang memuaskan.

#### 5). Sarana dan Prasarana yang dimiliki

Sarana dan prasarana yang dimiliki sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sudah cukup baik. Karyawan sejumlah 145 orang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka didukung oleh sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang tersebut sangat diperlukan oleh para karyawan untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Pada kenyataannya, sarana dan prasarana penunjang tersebut memang tergolong sederhana seperti bangunan tempat kerja, investor kantor, dll. Akan tetapi, para karyawan sudah merasa cukup terhadap sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah tersebut.

#### 6). Sanksi Bagi Wajib Retribusi

Pemungutan retribusi daerah dapat berlangsung dengan baik apabila wajib retribusi dengan penuh tanggungjawab melaksanakan semua kewajibannya dibidang retribusi daerah dengan benar. Hanya saja kondisi ideal ini tidak sepenuhnya dapat tercapai apabila wajib retribusi karena kealpaan atau

kesengajaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka dalam proses pengenaan dan pemungutan retribusi daerah perlu diatur ketentuan pidana yang akan memberikan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan retribusi daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang menetapkan sanksi yang sangat tegas bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran sehingga merugikan keuangan daerah. Wajib retribusi yang melakukan pelanggaran tersebut di ancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Sanksi tersebut sudah cukup tegas untuk menindak para wajib retribusi yang melakukan pelanggaran. Sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan pelanggaran itu.

#### 7). Insentif

Pemakaian sistem insentif untuk penentuan kompensasi bagi para karyawan dapat dilakukan untuk mendorong meningkatkan produktivitas karyawan. Para karyawan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang jarang menerima insentif tersebut. Kurangnya pemberian insentif tentunya menyebabkan penurunan produktivitas karyawan. Mereka merasa bahwa kerja keras yang mereka lakukan tidak dihargai. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, para karyawan menempuh berbagai cara untuk memperoleh uang tambahan. Salah satunya yaitu penyelewengan uang retribusi. Jadi, penyelewengan uang retribusi dipicu oleh minimnya pemberian insentif kepada para karyawan.



## b. faktor eksternal

faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar lingkungan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Faktor eksternal terdiri dari :

### 1). Kesadaran Wajib Retribusi

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Para wajib retribusi kurang menyadari akan kewajibannya. Mereka kurang menghargai tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Mereka menganggap bahwa para petugas penagih retribusi untuk tempat-tempat wisata tertentu tidak perlu menagih iuran retribusi kepada para pengunjung. Padahal sudah jelas bahwa setiap objek pariwisata di Kota Palembang sudah ditetapkan tarif retribusinya.

### 2). Pertumbuhan Objek Penerimaan

Objek penerimaan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sektor pariwisata beserta pendukungnya merupakan objek penerimaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Masyarakat sering mengeluh bahwa sektor pariwisata yang ada di Kota Palembang tidak mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, sektor pariwisata yang ada di Kota Palembang Masih kurang. Sehingga masyarakat sering merasa bosan mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Meskipun sarana pendukung seperti hotel dan restoran selalu bertambah, akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan tempat-tempat wisata.

### 3). Perekonomian Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir. Kota Palembang merupakan kota yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar khususnya untuk sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

### 4). Kebijakan Pemerintah

Pemerintah daerah Kota Palembang sangat memfokuskan tujuannya terhadap sektor pariwisata. Sebab dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Kota Palembang di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui kawasan objek wisata maupun sarana-sarana pendukung.

### 5). Kondisi Objek Penerimaan

Kondisi objek penerimaan sangat mempengaruhi kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan retribusi. Pengunjung ingin merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke berbagai tempat wisata. Sedangkan kondisi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang masih belum bisa memuaskan pengunjung.

Peranan Prasarana Usaha Kepariwisatahan Terhadap Penerimaan Retribusi Usaha Kepariwisatahan

**Tabel IV. 1**  
**Perkembangan Sarana dan Prasarana**  
**Pariwisata di Kota Palembang**  
**Tahun 2009**

<b>N0</b>	<b>Prasarana</b>	<b>Kondisi 2008-2009</b>
1	Transportasi Darat	Sudah ada tempat pemberhentian dan mobil trans musu yang bisa memberikan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
2	Transportasi Sungai	Banyaknya dermaga yang dibangun semakin memperlancar transportasi sungai.
3	Transportasi kereta api	Penyediaan gerbong dan sarana lainnya sudah cukup baik.
4	Tempat olah raga	Minimnya tempat olahraga.
5	Penginapan	Sudah banyak hotel-hotel berbintang.
6	Rumah Makan	Kurangnya rumah makan yang menyediakan makanan khas Palembang.
7	Toko Souvenir	Minim dan tidak meratanya toko souvenir serta tempatnya jauh dari obyek wisatanya.

**Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, 2010.**

Berdasarkan tabel IV. 1 diatas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sudah sangat baik, dengan mengembangkan beberapa sarana dan prasarana, seperti adanya pengembangan transportasi darat yaitu dengan adanya Bis Trans Musi meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang berusaha menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan. Kurangnya tempat olahraga, rumah makan yang menyediakan makanan khas Palembang serta toko souvenir yang membuat masyarakat dan para wisatawan tidak nyaman. Ketidaknyamanan para wisatawan dan madyarakat ini yang akan mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi Kota Palembang.

**Tabel IV. 2**  
**Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang**  
**Sebelum dan Sesudahnya Penambahan Prasarana**  
**Tahun 2009**

Prasarana	Sebelum Penambahan Prasarana			Setelah Penambahan Prasarana		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
BKB	56,678,400	54,493,500	53,534,200	54,507,900	54,275,100	53,408,000
KI	13,542,500	11,427,000	11,27,800	12,639,400	11,063,200	10,861,500

**Sumber : Hasil Pengolahan Data, 20010.**





Berdasarkan dari tabel VI. 2 di atas dapat di simpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang terus menambah sarana dan prasarananya, sedangkan pendapatan retribusi mereka terus menurun setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengunjung pada tempat-tempat wisata mereka mengatakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang hanya menambahkan sarana dan prasarananya saja, mereka mengeluhkan objek pariwisata yang ada di Kota Palembang sangat kurang, masyarakat bosan dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang.

Menurut Susilo cara menaikkan pariwisata dan minat para wisatawan adalah sebagai berikut :

- 1). Perlunya komitmen bersama dari semua elemen baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai aset yang mempunyai potensi besar. Artinya pariwisata dianggap sebagai aset yang dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak, bagi masyarakat pariwisata dapat memberikan kesempatan atau peluang untuk bekerja dan berusaha serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, bagi pemerintah pariwisata dapat memberikan andil yang sangat besar bagi Pendapatan asli daerah (PAD), bagi swasta pariwisata merupakan peluang untuk mengembangkan usaha yang lebih besar lagi.
- 2). Pengembangan pariwisata tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana pendukungnya, sehingga Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memperhatikan apabila ingin pariwisata bisa maju dan berkembang. Sesuai

dengan ahli pariwisata mengatakan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas *accessibility* yaitu sarana dan prasarana yang memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata dan tersedianya fasilitas *amenities* yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Bertolak dari pendapat tersebut maka sangat penting sekali sarana dan prasarana pendukung pariwisata dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata, sehingga merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengembangan pariwisata. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang harus mendirikan obyek wisata yang baru agar para wisatawan dan masyarakat yang ada di Kota Palembang tertarik untuk mengunjunginya sehingga penerimaan retribusi usaha kepariwisataan mencapai target yang diinginkan.

- 3). Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alam. Dalam hal ini sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam pengembangan pariwisata. Suatu kegiatan tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Demikian juga kualitas sumber daya alam juga sangat berpengaruh, karena sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali obyek wisata alam yang



ada di Kota Palembang yang mana diperlukan adanya perhatian dan pemeliharaan untuk menunjang eksisnya obyek wisata tersebut.

- 4). Melakukan promosi mengenai potensi-potensi obyek wisata yang ada di Kota Palembang, baik dalam cakupan regional maupun nasional bahkan internasional. Dengan promosi maka semua pihak akan dapat mengetahui apa saja yang ada di Kota Palembang terutama potensi wisatanya. Hal tersebut didasarkan dari Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan pada pasal 3, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek wisata dan daya tarik wisata yaitu melalui kegiatan promosi pariwisata.
- 5). Adanya suatu jaminan keamanan dan pemberian pelayanan prima kepada para wisatawan. Untuk dapat mengembangkan pariwisata diperlukan adanya manajemen pelayanan tersendiri. Wisatawan ibaratnya merupakan *customer* yang harus dilayani secara baik dan memuaskan sehingga mereka mempunyai kesan tersendiri dan kemungkinan mempunyai keinginan untuk berkunjung kembali.
- 7). Memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata, artinya pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan perijinan investasi baik kepada pihak luar maupun dalam negeri.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan prasarana usaha kepariwisataan terhadap penerimaan retribusi usaha kepariwisataan Kota Palembang maka dapat diambil kesimpulan bahwa objek wisata di Kota Palembang mempunyai kekuatan yaitu memiliki beberapa tempat objek wisata didalamnya baik potensi alam, budaya dan potensi buatan. Hal ini bermanfaat untuk menarik wisatawan untuk berkunjung atau melakukan perjalanan wisata permasalahan utama yang di hadapi adalah penambahan prasarana kepariwisataan Kota Palembang tidak berpengaruh kepada penerimaan retribusi daerah Kota Palembang, bahkan semakin menurun. Hal ini disebabkan masyarakat merasa bosan mengunjungi tempat-tempat wisata meskipun prasarana usaha kepariwisataan terus bertambah hal ini disebabkan oleh tidak adanya peningkatan tempat-tempat wisata yang baru.

#### **B. Saran**

Bagi dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar untuk mengembangkan potensi daerah pariwisata Kota Palembang dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (dengan cara mendirikan objek wisata yang baru), sekaligus dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keindahan dan kebersihan objek wisata, memperbaharui besarnya ketetapan tarif retribusi tempat rekreasi, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi sekarang.

Perlu adanya penyuluhan dan latihan keterampilan bagi masyarakat di sekitar objek wisata, baik dalam hal kelestarian lingkungan, pembuatan kerajinan souvenir yang dibutuhkan oleh para wisatawan dengan bahan baku yang tersedia di kawasan objek wisata , sehingga para pedagang tidak hanya menjual makanan dan minuman saja melainkan dapat menyediakan berbagai macam souvenir yang unik dan menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2007. Analisis **Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah**, <File://F:/PS%20NET%207.htm>. November.
- Hasan. 2002. Statistik 2, Edisi kedua, Jilid 1, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Indra Bastian, Gatot Soepriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama**, Jilid 1, Salemba 4, Jakarta.
- Keputusan Wali Kota Palembang No.12. 2004. **Tentang Mekanisme Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataaan.**
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2000. **Metodologi Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indrianto dan B. Supomo. 2002. **Metode Penelitian**. BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 24. 2007. **Retribusi Pembisaan Jasa Usaha Kepariwisataaan.**
- Peraturan Daerah No.66. 2001. **Tentang Retribusi Daerah.**
- Pismar Hariansyah. 2007. **Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kepariwisataaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang** ( Tidak Dipublikasikan )
- Pitana dan Gayatri. 2005. **Sosiologi Pariwisata**. Andi, Yogyakarta.
- Siahaan P. Marihot. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2003. **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomidan Bisnis**, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sugiono. 2001. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Ketiga, CV Alfabeta. Bandung.
- Susilo. 2000. Faktor-Faktor Penyebab **Belum Optimalnya Penerimaan Retribusi.**
- UU. No.18 Tahun 1997 Pasal 26, **Pemungutan Retribusi Tidak Dapat DiBorongkan.**

UU. No.18 Tahun 1997 Pasal 26, **Pemungutan Retribusi Tidak Dapat DiBorongkan.**

UU. No. 33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

UU. No. 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.**

Wahab, Salah. 2005. **Tourist Manajemen**, (on-line), (<http://one.indoskripsi.com>, di akses 15 Januari 2010)

W. Gulo. 2000. **Metode Penelitian**, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.

Yoeti, Oka A. 2002. **Pengantar Ilmu Pariwisata**. Angkasa, Bandung





# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2 Telp. 358450, 352573 Fax. 352573  
Palembang Kode Pos 30132

Palembang, 16 Januari 2010

Nomor : 556/ 0484 /Budpar/2010  
Tipe : Biasa  
Referensi : -  
Materi : Permohonan Bantuan Data

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
di -

PALEMBANG

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 12 Januari 2010 Nomor : 623/G – 17/FE – UMP/IV/2010 perihal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk menerima Mahasiswa/i melaksanakan pencarian/mengumpulkan data pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, atas nama Mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : Jeki Haryadi  
NIM : 222006078  
Program Studi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul : Peranan Prasarana Usaha Kepariwisata Kota Palembang Terhadap penerimaan Retribusi usaha kepariwisataan di Kota Palembang

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA PALEMBANG



DIS. BAHARUDDIN ALI, M.Sc  
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195509071980031013



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : JEKI HARYADI	PEMBIMBING
IM : 22 2006 078	KETUA : BETRI SIRAJUDDIN, SE., AK., M., ST.
AN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
SKRIPSI : PERANAN PRASARANA USAHA KEPARIWISATAAN KOTA PALEMBANG TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA PALEMBANG.	

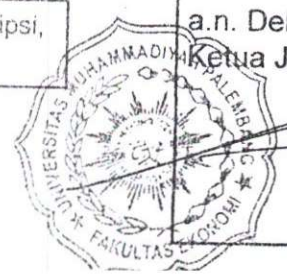
TGL/BL/TH ONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
13/3	4p		/	Acc
7/4	Boab 15/03		/	Boab
12/4	Boab 15/03		/	Boab
30/5	Boab 15/03		/	Boab
9/6	Boab 15/03		/	Boab
12/6	Boab 15/03		/	Boab
27/6	Boab 4/5		/	Boab
15/7	Boab 4/5		/	Boab
14/8	Boab 15/05		/	Boab
19/8	Boab 15/0		/	Acc
20/8	Boab 15/0		/	Acc
21/8	Absen		/	Acc

AN

wa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan,

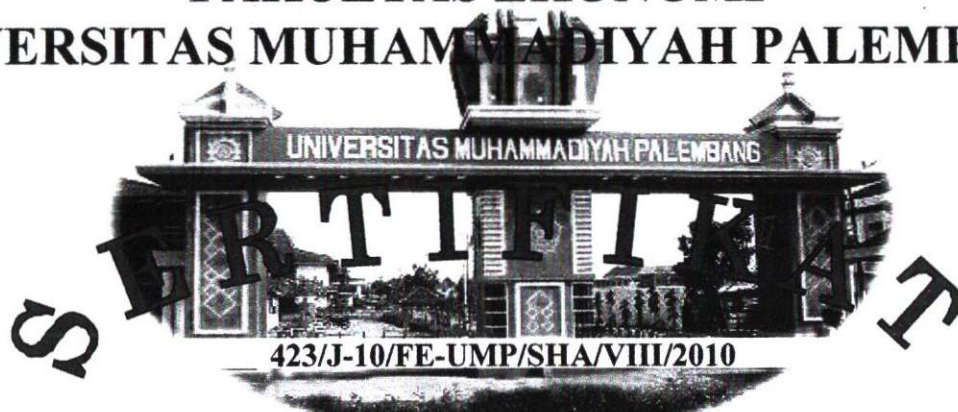


*[Handwritten signature]*





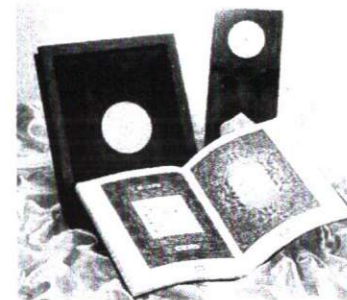
# FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : JEKI HARYADI  
NIM : 222006078  
JURUSAN : Akuntansi



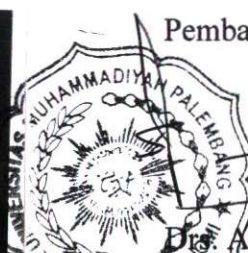
Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 23 Agustus 2010

an. Dekan

Pembantu Dekan IV

*Unggul dan Islami*



Drs. Antoni



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMERINTAH (DIII)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

№ 150/DP/0058

№ 2449/D/1/0013

№ 25/10/2008

**AKREDITASI**

№ 014/5AN-PT/IAK-X/51/10/2008 (S1)

№ 100/5AN-PT-AR/09/51/02/2005 (DIII)

№ 003/5AN-PT/AM/09-01/IV/2004 (S1)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (07111) S 1493 Faximile : (0711) 518018 Palembang 30263

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

**Hari/Tanggal** : Sabtu, 28 Agustus 2010

**Waktu** : 09.00 sd 12.00 WIB

**Nama** : Jeki Haryadi

**NIM** : 22.2006.078

**Jurusan** : Akuntansi

**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Sektor Publik

**Judul Skripsi** : PERANAN PRASARANA USAHA KEPARIWISATAAN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Betri Sirajuddin. SE.AK., M. Si	<b>Pembimbing</b>	3-9-2010	
2.	M. Taufiq Syamsuddin . SE.AK., M.Si	<b>Ketua Penguji</b>	4-9-2010	
3.	Rosalina Ghazali, S.E.,AK., M.Si	<b>Penguji I</b>	4-9-2010	
4.	Betri Sirajuddin, S.E., AK. M.Si	<b>Penguji II</b>	3-9-2010	
5.				

Palembang, September 2010

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E., M.Si



## BIODATA PENULIS

Nama : Jeki Haryadi

Nim : 22 220 078

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Mei 1988

Alamat : Jl. H. Faqih Usman Rt. 48 / Rw 5 Kel, 1 Ulu

Telepon : 081271405020

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Sofyan

2. Ibu : Haina

Pekerjaan Orang Tua :

1. Ayah : Wiraswasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Sda